

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asikin Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Djoko Sumaryanto. A, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Djaja Ermansjah, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid Abidin A.Z. dan Hamzah. A, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta : Rajawali Press, 2006, hal. 155.
- Hiariej, Eddy O.S., 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Persada Pers, Yogyakarta
- Istanto F. Sugeng, 2004, *Bahan Kuliah Politik Hukum*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangka Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Jimmy, Marwan. M, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Kaligis O.C. , 2015, *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan (Pasca UU No. 30 Tahun 2014)*, Alumni, Bandung.
- Kansil CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustakan, Jakarta.
- Marzuki Pater Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Mulia, Jakarta.

- Muhammad Abdulkadir, 2021, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- PM. Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Group, Jakarta
- Rusli Tami, 2017, *Sistem Badan Hukum Indonesia*, AURA.
- Sembiring Julius, 2012, *Tanah Negara*, STPN Press, Yogyakarta.
- Setiawan Arif. M dkk, 2019, “*Obstruction of Justice: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Lucas di Pengadilan Tipikor*”, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sutedi. A, 2002, *Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Navila.
- Sutedi Adrian, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan ke-IV. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sumardjono SW. Maria, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sumardjono SW. Maria, 2018, *Regulasi Pertanahan dan Semangat Keadilan Agraria*, Yogyakarta: STPN Press.
- Tutik Triwulan Titik, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Tjandra W. Riawan, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Wirandi Gunawan dan Tjondronegoro, 2008, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian Di Jawa Dari Masa Ke Masa*, Jakarta: Obor Indonesia.

### **Jurnal**

Antoro Sri Kus, 2015, *Analisis Kritis Substansi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bidang Pertanahan*, *Bhumi* Vol. 1, No. 1, Mei 2015.

Aulia Putri Febiyanti, 2019 *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa*, *Jurnal*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya, Vol. 8. No. 9 (2019).

Fatah Abtul, dkk, 2017, *Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, *Dipenogoro Law Jurnal*.

Fatkhurohman, Kurniawan Nalom, 2017, *Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, *Jurnal Konstitusi Volume 14, Nomor 1, Maret 2017*.

Huda Ni'matul, 2014, *Kedudukan Kuangan Desa dalam Sistem Keuangan Negara*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, vol. 21 No. 3

Kulsum Umi, Mashuri Muhammad, Ariesta Wiwin, *Ratio Decidendi Pertanggungjawaban Sekretaris Desa Tentang Penyalahgunaan Keuangan Desa (Studi Putusan Perkara Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN SBY)*, *Jurnal*, E-ISSN: 3031-0458, July 2025.

Kristianto Dhani, Setiawan Hari Aji Puguh, Iryani Deri, *Penerapan Delik Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus Tindak Pidana Perbankan di Indonesia*, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol.20, No.1 (2023).

Nadilla Indah, Danil Elwi, Yoserwan, *Eksistentsi Perbuatan Melawan Hukum Secara Materiil (Materiele Wederrechtelijkheid) Dalam Arti Negatif Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7 Issue 1, April 2023.

Pasmatuti Darda, *Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal*, Vol. 1 No. 1 Februari 2019

Purnomo Heru, *Pengakuan Hak Atas Tanah Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadinigrat dan Hak Atas Tanah milik Kadipaten Pakualaman (Recognition of Land Rights Owned by Ngayogyakarta Sultanate and Land Rights Ownes by Kadipaten Pakualaman)*, Jurnal Hukum dan Ham Wicarana, Vol.1, No.1, Maret 2022.

Pradika Helmi Dwi, , Irma Sukinta Chayanigtyas, *Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Diponegoro Law Journal, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022.

Rahman Hardiyanto, *Reformasi Birokrasi: Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol. 14 No. 1

Santosa D.H Gede A.A, 2019, *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*, Jurnal, Vol.5 No.2 Agustus 2019.

Sekarningrum, 2019, *Tanah Kas Desa yang Menjadi Penyertaan Modal dalam Badan Usaha Milik Desa*, Vol.2 No.1 (2019)0: NOTAIRE.

Sumardjono S.W Maria., 2012, *Aspek Hukum Tanah Kas Desa dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*, Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 3.

Wattimena Husin, 2016, *Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Masa Kini dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Vol. XII, No. 2.

Wicaksono Agung Dian, 2019, Ananda Prima Yurista, & Almonika Cindy Fatika Sari, *Mendudukan Kasultanan dan Kadipaten sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dalam Keistimewaan Yogyakarta*, Jurnal RechtsVinding, Volume 8 Nomor 3, 2019.

### **Karya Ilmiah**

Aisyah Siti, 2024, *Pendapatan Asli Desa Di Kalurahan Purwodadi Kapanewon Tepus Kabupaten Gunung Kidul*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Anugrah Ryan, 2025, *Optimalisasi Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

- Bimasena Nugroho Agung, 2020, *Analisis Eko-Spasial Pemanfaatan ‘Tanah Desa’ di Snduadi Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Institut Teknologi Yogyakarta.
- Fahrizal Reza, 2024, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Hakim Ditinjau Dari Teori Pidanaan*, Tesis, Magister Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada.
- Fahmi Fatahillah, 2017, *Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Universitas Islam Indonesia.
- Faridi Komar, 2017, *Dinamika Kerajaan Mataram Islam Pasca Perjanjian Giyanti Tahun 1755-1830*, Skripsi, Universitas Jember.
- Kayona, 2023, *Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Menggunakan Tanah Kas Desa; Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.
- Kurniawan Arif, 2023, *Problematika Penentuan Kerugian Perekonomian Negara Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Kurniawan Andy Muhammad, *Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Status Kepemilikan Tanah Sultan Ground*, Tesis, Universitas Islam Indonesia
- Muib, 2017, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tahap Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Noor Julian Hendry, 2018, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas, Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Petisa Pramana Sakti Tegar, 2024, *Sistem Pengelolaan Tanah Kas Desa di kalurahan Sumberarum Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman*, Skripsi, Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional Yogyakarta.

Prayitno Cuk, 2010, *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero*, Tesis, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

Ridwan Aziz Muhammad, 2018, *Kewenangan Penyadapan Oleh Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Gadjah Mada.

Riset Estungkara, 2024, Laporan Akhir Kajian-Kajian Tanah Kasultanan.

Sarjita, 2020, *Beberapa Pemikiran Tentang Status Tanah dan Dinamikanya*, Skripsi, STPN Press, Yogyakarta.

Yahya Bettina, 2017, *Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

## **Internet**

Mahkamah Konstitusi RI, Sidang Perkara Nomor 142, 161/PUU-XXII/2024, 11 November 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=oBD-dRE1UV8&t=1131s>

Putra Dani. Ml, *Keberadaan Sultan Ground Sebagai Dasar Pertanahan Keraton Kasultanan Di Indonesia*, IVVA Online, <https://ivaa-online.org/program/keberadaansultanground/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2025.

## **Peraturan Perundang – Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/IZ/2016.

*Rijksblad* Nomor 16 Tahun 1918 dan Nomor 18 Tahun 1918.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

Penjelasan Umum Nomor II angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penjelasan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.